

Menakar Efektivitas Bantuan Sosial Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kota Malang

Heylen Amildha Yanuarita¹, Djoko susanto²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri

Article Info	Abstract
Article history: Received 10 November 2021 Publish 12 November 2021	<i>The Social Assistance Program is assistance originating from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is then provided to the community based on Integrated Social Welfare Data (DTKS). The purpose of this research is to find out how effective the implementation of the Social Assistance program is in meeting the needs of people affected by COVID-19 in Malang City. Factors that hinder the implementation of social assistance programs. The theory used in this research is the theory of program effectiveness by Budiani using 4 indicators (Program Objectives, Program Socialization, Target Accuracy, Program Monitoring). This problem was answered by the researcher using a qualitative method with a descriptive approach. This study used data collection techniques in the form of observation, documentation and then analyzes according to the problem to be investigated by the researcher. The results of this study indicated that the effectiveness of social assistance against COVID 19 in Malang City is seen from 4 indicators (Program Objectives, Program Socialization, Target Accuracy, Program Monitoring) which are not yet effective. The inhibiting factor in this study was the validation and the program that was issued suddenly.</i>
Keywords: Effectiveness Social assistance Social assistance program	
Info Artikel	Abstrak
Article history: Diterima 10 November 2021 Publis 12 November 2021	Program Bantuan Sosial ialah bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kemudian diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Malang. Faktor yang menghambat pelaksanaan program bantuan sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori efektivitas program oleh Budiani memakai 4 indikator (Tujuan Program, Sosialisasi Program, Ketepatan Sasaran, Pemantauan Program). Permasalahan ini akan dijawab oleh peneliti memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi kemudian menganalisis sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial terhadap COVID 19 di Kota Malang dilihat dari 4 indikator (Tujuan Program, Sosialisasi Program, Ketepatan Sasaran, Pemantauan Program) belum efektif. Faktor yang menghambat dalam penelitian ini ialah validasi serta program yang dikeluarkan secara mendadak.
	<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>
Corresponding Author: Heylen Amildha Yanuarita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri Email: heylenay@unik-kediri.ac.id	

1. PENDAHULUAN

Kerentanan akan pangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia ialah sebuah tantangan yang sudah dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan adalah masalah yang amat kompleks untuk menginginkan akan adanya sebuah penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan menurut Bappenas, 2017. Agar dapat meringankan sebuah kemiskinan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sandang pangan, pemerintah menggunakan berbagai program serta stimulus.

Kemiskinan akan terus bertambah menjadi sebuah masalah yang fenomenal di belahan dunia, terutama untuk Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan juga sudah membuat jutaan anak tidak dapat belajar seperti biasanya, kesulitan dalam hal biaya kesehatan, berkurangnya tabungan serta investasi, dan masalah lain yang akan menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan.

Kemiskinan yang terjadi di dalam negara memang membutuhkan penglihatan untuk suatu masalah yang sangat serius, hal ini disebabkan karena saat ini sedang mengalami kemiskinan, sehingga membuat banyak masyarakat Indonesia juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam penilaian masyarakat, bantuan sosial yang berasal dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 belum efektif. Sebanyak 49% yang menyatakan bahwa bantuan sosial itu belum tepat pada sasaran. Sebaliknya, 37% menilainya telah mencapai sasaran. Penilaian itu berada di tengah suasana keadaan ekonomi yang dirasakan memburuk oleh warga. Sebanyak 79% warga juga merasa akan keadaan ekonomi rumah tangga mereka menjadi lebih buruk sekarang dibanding sebelum adanya wabah Covid-19, dan sebanyak 84% merasa demikian untuk kondisi ekonomi nasional. Keadaan seperti ini semua warga mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah.

Warga yang menginginkan akan bantuan untuk kebutuhan pokok mendesak ialah warga yang miskin. Menurut Data Susenas (BPS) Maret 2019 (sebelum adanya Covid-19), terdapat kurang lebih sekitar 34% warga yang berada di bawah garis kemiskinan hingga yang ada di atasnya (warga yang rentan miskin).

Karena Covid-19, warga yang rentan akan miskin itu sekarang telah diperkirakan telah masuk ke dalam kelompok miskin. Hingga sampai saat ini ada 21% warga yang mengaku sudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Masih ada sekitar 13% yang belum menerima bantuan tersebut. Sebanyak 87% warga yang sudah memperoleh bantuan pun serta menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak cukup untuk dua minggu bahkan kurang. Bantuan sosial juga dinilai belum mencapai sasaran dikarenakan banyak yang membutuhkan mendesak akan tetapi tidak memperoleh, namun yang seharusnya tidak memperoleh mereka malah dapat.

Pandemi Covid-19 sudah datang sejak 3 bulan yang lalu. Adanya kebijakan social distancing serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa mengurangi di semua kegiatan masyarakat yang ada diluar rumah, termasuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Survei SMRC yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 April 2020 sudah ditemukan adanya dampak Covid-19 yang cukup besar terhadap sebuah ketahanan ekonomi rumah tangga.

Akan tetapi pemerintah juga belum mengetahui angka statistik kemiskinan yang terbaru, untuk itu menteri keuangan Sri Mulyani sudah mengakui akan adanya pandemi ini sudah membalikan semua capaian akan program pengurangan kemiskinan. Hal seperti ini bisa melonjak angka pengangguran, PHK dikarenakan berhentinya sektor industri. Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Perpu No 1 tahun 2020 untuk dasar kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak sosial ekonomi dari wabah Covid-19.

Dalam menangani dampak sosial ekonomi maka umumnya masyarakat rentan miskin dan palingmiskin dalam perpu juga mengalokasikan anggaran khusus untuk program jaringan Pengaman Sosial sebesar 110 triliun untuk bentuk kegiatan. Diantaranya kartu prakerja, PKH, sembako, BLT. Akan tetapi adanya sebuah pertanyaan, berapa banyak warga yang menginginkan bantuan sosial?

Seberapa besar tepat sasaran bantuan sosial yang telah menerima bantuan sosial? Seberapa efektifkah bantuan sosial dapat mengurangi kebutuhan hidup warganya? Untuk masalah ini bisa diatasi dengan cara mengamati sebuah pengalaman serta pendapat warga dengan cara survei opini publik nasional. SMRC juga sudah melakukan dua kali survei dalam periode April-Mei 2020.

SMRC juga sudah melaksanakan sejumlah survei nasional dengan cara memilih sampel secara random dari populasi dengan cara memilih WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Semua responden yang ada dalam survei tersebut diwawancarai dengan cara bertatap muka secara langsung.

Ini semua dilakukan untuk mengetahui kebenaran akan isu-isu, maka melakukan survei telepon kepada responden sekitar 73,6% dari populasi nasional. Survei melalui telepon juga mempertimbangkan aspek metodologi secara seksama ialah dengan cara yang paling dimungkinkan ditengah pandemi upaya warga dalam melakukan social distancing.

Covid-19, merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang memiliki arti sebagai penyakit yang bisa menyerang saluran pernapasan manusia. Saat ini, hingga berada di dunia tengah hingga kita berjuang melawan pandemi Covid-19 ini, ini tidak lah mudah karena virus ini memiliki kecepatan dalam menular. Hingga tepat di hari ini juga total kasus Covid-19 naik hingga bisa mencapai 10,250,355 yang mana sebanyak 5,558,162 sudah sembuh sedangkan 504,500 meninggal dunia.

Sedangkan untuk di Indonesia sendiri kasus Covid-19 yang sudah terkonfirmasi sebanyak 54,010 kasus dengan angka kematian bisa mencapai 2,754 kasus kemudian angka yang sembuh 22,936. Untuk pertama kali munculnya covid-19 ialah di Indonesia, DKI Jakarta menjadi daerah yang memiliki angka tertinggi. Namun seiring dengan berjalannya waktu angka kasus positif Covid-19 tertinggi diduduki oleh daerah Jawa Timur serta Surabaya.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif Covid-19 ini adalah dengan cara penerapan physical distancing, work from home (WFH), penggantian kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi daring kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya lainnya. Upaya-upaya tersebut akan terus diterapkan kepada semua masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali meski pada akhirnya terjadi penurunan perekonomian. Dikutip dari situs bps.go.id, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami keterlambatan jika dibanding triwulan I-2019 yaitu dari 5,07 persen menjadi 2,97 persen. Selain itu terjadinya penurunan ekonomi juga banyak pekerja yang terkena PHK, usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar, karena penurunan penghasilan bagi para pedagang, supir angkutan umum, ojek online, dan lain sebagainya. Semua lapisan masyarakat mengalami kerugian tersebut.

Pemerintah selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis, juga membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan lain sebagainya yang pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan (Arika Bagus P et al, 2020, 6).

Banyaknya para pekerja yang di PHK akan menambah jumlah kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus. Bantuan sosial khusus ini perlu dikeluarkan karena banyaknya pekerja informal yang mengalami penurunan drastis bahkan sampai kehilangan penghasilan akibat kebijakan-kebijakan

yang ada, semakin bertambahnya kelompok rentan dikarenakan banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya (Lestary J. Barany et al, 2020, 3) serta penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa: Satu, Pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Kedua, Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000 perbulan. Ketiga, penerbitan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000 selama 4 bulan.

Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tariff listrik 450 VA. Kelima, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000 dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuanbantuan lainnya. Dari berbagai bentuk bantuan tersebut, penulis fokus meneliti mengenai 2 jenis bantuan yakni BST dan pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial selama pandemi atau yang disebut BLT-Dana Desa yang mana keduanya bernilai sama Rp. 600.000 dan akan disalurkan selama 3 bulan. Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran dari penerimaan bantuan tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro. Dan Kota Malang menjadi salah satu desa yang meyalurkan bantuan tersebut kepada warganya. Syarat utama dari penerima BST dn BLT-Dana Desa adalah mereka yang bukan penerima Bansos PKH dan Bansos Sembako. Penyaluran bantuan di Kota Malang sudah berjalan selama 3 bulan, para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab pada umumnya data yang ada telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.

Pemerintah membentuk program bantuan selama Covid-19 mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan program bansos tersebut. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat. Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran.

Oleh karena itu, pengukuran efektivitas pemilu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini masih ada. Berlandaskan paparan permasalahan dalam program BLT selama Covid-19 diatas, dapat diketahui bahwa supaya program ini bergerak optimal sesuai tujuan maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Sosial terhadap pemenuhan kebutuhan selama Covid-19 ini ada khususnya di Kota Malang. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul “Menakar Efektivitas Bantuan Sosial Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kota Malang”

Rumusan masalah yang didapat dari permasalahan di atas yaitu: Bagaimana pelaksanaan bantuan sosial dari Pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Malang dan bagaimana efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui

Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Malang dan menakar Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan di Kota Malang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan serta menjelaskan secara sistematis mengenai sebuah masalah yang akan diteliti melalui analisis yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dari perusahaan kemudian dilakukan penganalisisan hingga memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas mengenai objek yang akan diteliti. Peneliti memilih penelitian kualitatif dikarenakan menginginkan bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Malang serta faktor – faktor apa saja yang bisa menghambat terlaksananya efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Malang.

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang berguna untuk ditunjukkan menggambarkan atau mendeskripsikan akan fenomena-fenomena yang sudah ada, baik yang bersifat rekayasa atau alamiah, kemudian memperhatikan karakteristik, keterkaitan antar kegiatan, kualitas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi kemudian menganalisis sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Malang ialah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di Jawa Timur kota Malang termasuk kota terbesar kedua sesudah Surabaya kemudian kota terbesar ke 12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan yang letaknya berada di daerah dataran tinggi memiliki luas 145,28 km².

Program bantuan sosial di Kota Malang dilaksanakan menjadi 9 tahap dimulai dari April-Desember 2020. Berikut ialah tahapan, serta jadwal dan KPM yang dilakukan di Kota Malang melalui kantor pos.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Malang

Tahap Penyaluran	Jadwal Penyaluran	KPM
Tahap 1	9 Juli 2020	100
Tahap 2	10 Juli 2020	100
Tahap 3	12 Juli 2020	98
Tahap 4	25 Agustus 2020	85
Tahap 5	25 Agustus 2020	85
Tahap 6	18 September 2020	85
Tahap 7	16 Oktober 2020	85
Tahap 8	16 November 2020	80
Tahap 9	26 November 2020	80

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tahap pertama dan kedua KPM yang menerima yaitu 100 orang, kemudian di tahap ketika berkurang 2 orang menjadi 98 orang penerima dikarenakan meninggal dunia. Selanjutnya untuk tahap empat sampai dengan tahap ke tujuh dikurangi 13 orang menjadi 85 orang penerima karena di rasa sudah mampu serta ada yang pindah kemudian tidak melapor. Di tahap terakhir tahap delapan dan sembilan berkurang 5 disebabkan adanya data ganda. Kemudian total penerima menjadi 80 orang.

Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Malang

Terlihat beberapa yang efektif pelaksanaan program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di Kota Malang memakai 4 indikator menurut Budiani, 2007 meliputi yaitu tujuan, sosialisasi, ketepatan sasaran dan pemantauan program. Berikut penjelasan diantara lain:

Tujuan Program

Tujuan adanya program ini adalah untuk melihat sejauh mana kesesuaian diantaranya yaitu hasil dari pelaksanaan program yang memiliki tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa aspek tujuan program penulis menginginkan untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan sosial di kota Malang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Tujuan adanya program bantuan sosial adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak covid-19 serta belum sepenuhnya tercapai. Masyarakat juga merasa kurang dengan nominal yang telah diberikan dikarenakan selama tiga bulan pertama enam ratus ribu kemudian ditahap selanjutnya berkurang menjadi tiga ratus ribu apalagi jika masyarakat merasa kebutuhan mengalami kenaikan akan harga dan pendapatan mereka selama pandemi covid-19 ini juga menurun secara drastis.

Sosialisasi Program

Langkah pertama ketika akan dilakukan suatu program tentunya dilaksanakan sosialisasi yang terlebih dahulu. Untuk tahap ini masyarakat sudah diberi informasi mengenai program bantuan sosial yang ada pada masa pandemi covid-19 tersebut. Proses sosialisasi termasuk salah satu proses terpenting yang dilaksanakan dalam program dikarenakan dengan sosialisasi masyarakat akan mengetahui secara terperinci apa tujuan dan makna program tersebut. Aspek yang terukur bagaimana pemahaman pemerintah terkait akan program bantuan sosial serta pemahaman KPM tentang program tersebut. Di kota Malang tentang sosialisasi tentang program bantuan sosial tidak adanya sosialisasi, masyarakat juga tidak memahami akan program bantuan sosial serta masyarakat yang ada tidak mengetahui akan program bantuan sosial itu sendiri.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta yang ada di dalam program ini tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk menganalisis ketepatan sasaran program yang indikatornya ialah ditunjukkan kepada masyarakat. masyarakat akan menjadi sebuah target utama ialah masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), ketepatan atas sasaran dalam pemilihan KPM bisa diwujudkan dengan adanya tujuan program bantuan sosial.

Aspek ini mencoba dalam mengukur bagaimana kesesuaian program terhadap kelompok KPM. Hal ini sesuai dengan surat keputusan direktur jenderal fakir miskin No 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Mengenai Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin no 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Akan Dampak Corona (Covid-19).

Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan sesudah dikerjakannya sebuah program bantuan sosial sebagai bentuk perhatian kepada peserta program bantuan sosial yang ditangani oleh masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemantauan juga bisa dikatakan sebagai kegiatan dalam mengamati sebuah perkembangan dalam pelaksanaan program, mengantisipasi dalam sebuah permasalahan untuk bisa mengambil tindakan yang sedini mungkin.

Di kota Malang itu sendiri memantau tentang program bantuan sosial yang telah direalisasikan serta diterima langsung oleh masyarakat atau KPM yang bersangkutan tidak ada potongan serta pihak yang telah melaksanakan pengawasan semampu mereka adalah kemudahan serta pengaduan jika terjadi permasalahan data serta pengambilan dana bantuan sosial yang sudah diwakilkan oleh KPM dikarenakan berhalang hadir pada hari pencairan yang berlangsung di Kantor pos. Adanya program pemantauan ini telah dikatakan efektif hal ini dikarenakan masyarakat bisa menikmati secara langsung dengan bantuan sosial tiada potongan apapun.

Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Malang

Pelaksanaan dalam menyelenggarakan sebuah program yang selalu ada penghambat didalam pelaksanaannya. Dalam mencapai suatu keinginan kemudian diharapkan dalam melakukan program maka tidaklah mudah dalam segala urusan hal ini dilakukan secara optimal. Capaian hasil bisa memuaskan hal ini tidak akan terlepas dari sebuah hambatan-hambatan serta kendala-kendala yang dikarenakan oleh beberapa faktor yang berbeda dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang ada di Kota Malang. Apabila faktor yang menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaannya tidak bisa diatasi dengan baik maka akan berdampak pada kegagalan yang ingin dicapai tujuan dalam program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di kota Malang akan menemukan faktor-faktor yang menjadi sebuah penghambat keefektifan dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang ada pada masa pandemi covid-19 di Kota Malang sebagai berikut:

1) Validasi Data

Faktor yang menghambat bisa terjadi pada saat validasi data. Dikarenakan pada awal yang diambil adalah melalui sebuah data dari verifikasi yang berasal dari kelurahan hingga penyaluran bantuan sosial kemudian dilaksanakan memperoleh data ganda dan NIK KPM kosong atau tidak valid.

2) Program Bantuan Sosial yang dikeluarkan secara mendadak

Faktor yang bisa menghambat program bantuan sosial yang dikeluarkan secara mendadak. Hal ini dikarenakan mendadak sampai masyarakat tidak mau menerima sosialisasi dari mana saja serta pihak pemerintah yang setempat kemudian tidak sempat melakukan sosialisasi.

Dalam pelaksanaan suatu program terutama bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tidak bisa dipungkiri pasti terdapat kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemic Covid-19 yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat suatu masyarakat yang tidak mendapatkan BST/BLTDana Desa bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, agar program bantuan sosial BST dan BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya, diperlukanlah pengukuran efektivitas suatu program. Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik.

Dalam KBBI diartikan sebagai pendayagunaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun. Efektivitas adalah pendayagunaan sarana prasarana dan sumber daya dalam kuantitas tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan pada waktunya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut. Karena pada dasarnya efektivitas mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana (Ririn Anjela, 2019, 9-11). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan program tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Tingkat keefektifitasan sebuah program dapat diukur menurut berbagai sudut pandang tergantung bagaimana cara menilai dan mengimpresifikannya. Apabila suatu pekerjaan dan hasil usaha tidak mencapai sasaran yang diharapkan, bisa dikatakan bahwa hal tersebut belum efektif, begitupun sebaliknya. Untuk mengukur keefektifan sebuah program dibutuhkan tiga indikator, diantaranya: 1. Pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Ada dua faktor, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata 2. Integrasi, yaitu mengukur tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsekuensi, Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Berkaitan dengan kesesuaian antara program dengan keadaan dilapangan. Berdasarkan teori efektivitas dan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, bisa diamati bahwa efektivitas pelaksanaan program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gendongarum selama 3 bulan ini telah terealisasi dalam beberapa sisi keefektifan, diantaranya: Jika dilihat didalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan jangka waktu dan besaran BLT-Dana Desa yang menyatakan bahwa bantuan jenis ini akan diberikan kepada masyarakat selama 3 bulan dan paling cepat bulan april 2020.

Begitu juga dengan BST yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi didalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Maka Kota Malang sebagai salah satu desa yg melaksanakan program bantuan baik BST maupun BLT-Dana Desa telah melakukan penyaluran selama 3 tahap berawal dari bulan mei, juni dan juli. Untuk tanggal penerimaan bantuan baik BST ataupun BLT-Dana Desa Sehingga jika dilihat dari segi ketepatan waktu, penyaluran BST dan BLT-Dana Desa telah terlaksana dengan tepat waktu. Tidak ada penundaan hingga bulan berikutnya.

Sedangkan untuk tanggal pengambilan didalam peraturan tidak diatur secara jelas. Akan tetapi hal ini tidak menjadi permasalahan bagi warga yang menerima bantuan. Pemilihan penerima bantuan sosial baik BST maupun BLT-Dana Desa tentu tidak akan bisa terhindar dari berbagai problematikanya. Persyaratan pokok dari penerima bantuan ini adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan apapun berupa pkh, bpnt, ataupun sembako. Tujuannya tentu agar bantuan ini bisa merata bagi seluruh warga.

Kota Malang menjadi salah satu desa yang menyalurkan BST dan BLT-Dana Desa dengan jumlah 100 KK untuk penerima BST dan 26 KK untuk BLT-Dana Desa. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan tidak mendapatkan bantuan lain. Akan tetapi, faktanya terdapat beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Padahal adanya Covid-19 ini merugikan seluruh masyarakat di Kota Malang tidak hanya beberapa orang saja. Hal tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial.

Tepat setelah penyaluran BST dan BLT-Dana Desa tahap pertama di Kota Malang terdapat beberapa warga yang merasa tidak adil atas pembagian kedua bantuan tersebut. Warga tersebut benar-benar mengalami dampak yang cukup signifikan dari adanya pandemi Covid-19 ini yakni berupa penurunan penghasilan apalagi warga tersebut sudah menjadi janda dan harus menghidupi anak-anaknya yang kebutuhan saat pandemi seperti ini jelas lebih banyak yakni pembelian paket data yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran daring. Tapi justru ia tidak mendapatkan bantuan apapun baik BST, BLT-Dana Desa bahkan sembako. Sehingga menyebabkan beberapa warga tersebut protes kepada perangkat desa.

Akibatnya perangkat desa memutuskan untuk membagikan sembako secara merata kepada seluruh masyarakat di Kota Malang tanpa terkecuali. Sembako ini berupa kebutuhan pokok yakni Beras 3 Kg, Minyak Goreng 1L, Gula Pasir 1 Kg, Mie Instan 10 Bungkus yang dikeluarkan kepada tiap KK di Kota Malang. Sembako ini murni berasal dari dana Kota Malang diluar dana untuk penyaluran BLTDana Desa (wawancara dengan Ahmad Yasa', 23 Juni 2020) Inisiatif para perangkat desa gedongarun sangatlah baik, karena dengan hal ini bisa sedikit mengurangi kecemburuan sosial akibat pembagian BST ataupun BLT-Dana Desa yang tidak tepat sasaran. Bantuan sembako ini hanya berjalan selama 1 bulan yakni pada bulan Mei meski hanya 1 bulan bantuan ini cukup membantu para warga yang protes tersebut.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari adanya BST dan BLT-Dana Desa ini masih belum berjalan efektif. Penerimaan bantuan ganda tersebut disebabkan oleh penggunaan data yang belum diperbarui. Berdasarkan pernyataan dari para perangkat desa, untuk BST ini data yang digunakan adalah data langsung dari pihak pusat yakni dinas sosial yang mana data ini merupakan data terdahulu.

Berdasarkan pernyataan tersebut data tahun 2013-2014 tersebut pun menjadi tidak relevan jika digunakan untuk saat ini. Karena realitanya terdapat masyarakat yang pada tahun 2013 memang kebutuhannya tidak tercukupi akan tetapi saat ini sudah berkecukupan meski tetap mengalami dampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat terlihat jika kedua bantuan sosial tersebut memang belum mengcover seluruh kelompok rentan yang terdampak dari kemunculan pandemi Covid-19 ini. Masalah lain yang muncul dalam proses pelaksanaan bantuan sosial ini dapat dilihat dari prosedur penentuan sasaran penerima BLT-Dana Desa. Kota Malang telah melakukan prosedur pemilihan calon penerima BLT-Dana Desa sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun.

Dalam wawancara penulis dengan Ahmad Yasa' (23 Juni 2020) yang menyatakan bahwa perangkat desa telah melakukan musyawarah dengan DPD untuk menentukan siapa saja penerima dari BLT-Dana Desa ini.

Akan tetapi, memang penyeleksian dari penerima bantuan langsung tunai dana desa ini sangat sulit dikarenakan kriteria penerima yg pada dasarnya jika dilihat dengan keadaan sekarang tidak relevan. Tidak ada warga yang memiliki kriteria dengan yang sudah ditentukan seperti penerangan tanpa listrik, luas tanah 4x4 m2 dan 12 kriteria lainnya. Akan tetapi, dikutip dari ombudsman.go.id bahwa berdasarkan klarifikasi kementerian desa jika pendataan tidak mnegacu pada 14 kriteria tersebut. Karena pada dasarnya pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilihat dari 3 kriteria pokok yang diatur didalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020.

Sedangkan untuk BST, data penerima berasal dari pusat sehingga perangkat desa di Kota Malang hanya membantu proses penyaluran saja seperti pemberitahuan kepada masyarakat yang menerima ketika bantuan sosial tunai mereka telah cair. Akan tetapi berdasarkan pernyataan dari Bapak Ahmad Yasa', Bapak Purwanto dan Ibu Suwarni untuk BST yang dikeluarkan oleh Kemensos di Kota Malang ini tidak tepat sasaran. Karena data yang digunakan sudah lama dan berdasarkan pernyataan beberapa narasumber baik yang mendapatkan bantuan atau tidak, tidak pernah ada pendataan oleh perangkat desa. Padahal kemunculan pandemi Covid-19 ini menimbulkan kelompok-kelompok rentan lainnya yang sangat membutuhkan bantuan sosial untuk keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, saat proses penyaluran terdapat 2 bentuk instrumen untuk BST dan 1 bentuk untuk BLT-Dana Desa. Dalam hal penyaluran rekening tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika diamati instrumen penyaluran ini lebih efisien dikarenakan para penerima tidak harus mengantri dan tidak terdapat biaya admin. Akan tetapi terdapat salah satu penerima bst lewat rekening yang justru tidak mengambil bantuan tersebut sehingga pada akhirnya menumpuk. Ia hanya mengambil ketika memang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut seperti terliha jika masih ada penerima bantuan sosial tunai yang realitanya memang terdampak Covid-19 tapi masih bisa dikatakan sebagai keluarga yang mampu sehingga kurang layak untuk mendapatkan banfyan sosial tunai tersebut. Oleh karena itu, penggunaan rekening kurang begitu efektif terutama jika sasarannya juga tidak tepat. Pada dasarnya permasalahan yang menjadi program BST dan BLT-Dana Desa di Kota Malang kurang efektif adalah data yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran karena tidak ada pembaharuan. Data yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan permasalahan-permasalahn lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas.

4. KESIMPULAN

Pemberdayaan penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang berwenang di bidang kesejahteraan sosial sudah cukup baik dan memadai sesuai degnan Permendagri dalam Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma. Kegiatan yang lain yang berupa Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, juga telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat membantu mendeteksi diri daripada penyandang disabilitas yang ada di Kota Kediri serta merekomendasikan dari permasalahan yang ada di lapangan untuk dicari pemecahan atau jalan keluarnya dan merangsang seluruh unsur masyarakat agar mau berperan aktif dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi para disabilitas.

Disamping itu Dinas Sosial Kota Kediri juga telah berhasil menggandeng pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Kediri untuk menjadi donator bagu penanganan para penyandang disabilitas di Kota Kediri sekaligus membantu pemerataan dari produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang ditulis kemudian dipaparkan pada bab yang sebelumnya maka seorang penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas adanya pelaksanaan program bantuan sosial di kota Malang sehingga bisa disimpulkan belum efektif dalam setiap indikator efektivitasnya yaitu:
 - a. Pada aspek tujuan program, baik KPM maupun pihak sebagai pelaksana sudah berusaha untuk mewujudkan sebuah tujuan program supaya bisa berjalan efektif. Akan tetapi pada kenyataannya hanya berpihak dalam pelaksana yang mengetahui akan tujuan dari program bantuan sosial ini sedangkan KPM tidak akan peduli serta tidak tahu apa tujuan dari sebuah program bantuan sosial.
 - b. Pada aspek sosialisasi program, ada beberapa aparat yang memiliki peran dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini masih sepenuhnya belum memahami juknis yang sudah diberikan, sebaliknya masyarakat yang tidak paham akan kenapa bantuan sosial ini diberikan serta untuk apa.
 - c. Pada aspek ketepatan sasaran, ada keluarga penerima manfaat masih tumpang tindih. Hal ini ini bisa dibuktikan dengan data yang pertama untuk menjadi acuan data dari DTKS. Ini sudah dibuktikan bahwa tidak efektifnya dalam pemilihan sasaran di Kota Malang.
 - d. Pada aspek pemantauan program, tidak hanya kota yang ikut campur sedangkan ada pihak dinas sosial yang tidak ikut andil dalam menjalankan pemantauan program bantuan sosial.
2. Faktor-faktor penghambat keefektifan dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Kota Malang ada tiga faktor diantaranya yaitu:
 - a. Faktor validasi data, adanya sebuah kejadian yang pengambatnya dalam faktor ini adalah adanya NIK yang tidak valid dalam penyaluran dana bantuan sosial.
 - b. Faktor program yang dikeluarkan secara mendadak diketahui tidak akan paham masyarakat tentang program bantuan sosial karena kurangnya sosialisasi akan dilakukan oleh pemerintah setempat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. 2015. *The Effectiveness of the Implementation of Street Children Handling Programs at the Social Service Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Anjela, R. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Budiani, Ni Wayan. 2007. The Effectiveness of Youth Youth Organization Unemployment Program "Eka Taruna Bhakti" Sumerta Kelod Village, East Denpasar District, Denpasar City. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2 No. 1. Dini, A. N. dkk. 2018, Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik.
- Emalia, Sulfa. "Analysis of the Effectiveness of the Implementation of the Raskin Program in the City of Bandar Lampung". Dalam: *Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung*. Vol. 6 (1): 46-54.
- Hidayat, Alan. 2018, *The Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in East Bekasi District*, Margahayu Village, Public Administration Journal Vol. 2 No. 2 Harmoko Pedro. 2010. The Effectiveness of the Raskin Program in Banjarsari Subdistrict, Surakarta City, 2009. Dalam: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 regarding the Implementation of Basic Food Social Assistance and Cash Social Assistance in Handling the Impact of COVID-19.
- Metry. 2015. *Poor Rice Distribution Effectiveness (RASKIN), Case Study in Palopo City, South Sulawesi Province*. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nababan, Dewi Riris Natalia. 2015. The Effectiveness of the Social Service Program for Disaster Victims Children by the Urban Social Working Group Foundation (KKSP) in Kutabelin Village, Namanteran District, Karo Regency.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87.
- Putra, A. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1-8.
- Putra, A. A. 2018, The Effectiveness of the Implementation of Social Assistance Programs for Communities in Palu City (Study of Joint Business Groups). Volume 6 Nomor 8 Agustus 2018 hlm 1-8. ISSN: 2302-2019.
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 96-111.
- Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaja, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 2(1), 74-87.
- Suryahadi, A., Kusumawardhani, N., & Al Izzati, R. (2018). Efektivitas program bantuan sosial dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. *The SMERU Research Institute*.